

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara menunjukkan fleksibilitas Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara berperan sebagai fasilitator dalam perundingan bipartit, mediator dalam konflik, dan belum menjalankan prosedur konsiliasi dan arbitrase. Serta memberikan penyuluhan, membantu mencapai kesepakatan, memperkuat peraturan, dan melakukan penelitian serta evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi MSDM dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial keterbatasan sumber daya manusia dan jenis perselisihan yang beragam seperti skala upah, kontrak kerja, K3, dan PHK, implementasi K3 mengalami kendala karena pengawas K3 ditarik ke provinsi wilayah 2 Bungku. Dinas tidak dapat memantau sepenuhnya karena sistem pelaporan perusahaan langsung ke tingkat provinsi dan perusahaan tidak rutin melaporkan perkembangan perusahaan ke dinas setempat, Serikat pekerja mendukung dengan bantuan hukum dan moral, namun dinas sering kesulitan memanggil pihak perusahaan untuk mediasi

5.2. Saran

- a. Menambah pejabat fungsional yaitu mediator agar proses penyelesaian kasus yang ditangani lebih efektif.
- b. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan maupun pendidikan khusus kepada seksi hubungan industrial yaitu mediator agar menjalankan tugas menjadi lebih baik dan efektif.
- c. Dinas lebih memperhatikan persoalan kesehatan keselamatan kerja khususnya pengawasan dan penanganan k3
- d. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk proses mediasi, seperti ruang mediasi yang nyaman dan peralatan teknologi yang mendukung (misalnya, alat perekam untuk mendokumentasikan proses mediasi).
- e. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pemantauan dan pengelolaan kasus perselisihan, Memanfaatkan teknologi komunikasi untuk memfasilitasi mediasi jarak jauh jika diperlukan, terutama untuk daerah yang sulit dijangkau.
- f. Sebaiknya pihak perusahaan melaporkan secara rutin pelaporan kedinas tenaga kerja Kabupaten morowali utara terkait perkembangan perusahaan jangan langsung ketingkat provinsi.